

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Istilah *whistle blower* dan *justice collaborator* kini kerap muncul dalam penanganan kasus korupsi, akan tetapi tidak hanya penanganan korupsi saja yang ada istilah tersebut. Istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 disebutkan, *whistle blower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui perbuatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat

terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.<sup>1</sup>

Istilah Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di Indonesia baru diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang telah meratifikasi konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yang telah pula meratifikasi konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes*) Tahun 2002, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Bersama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (selanjutnya disebut SEMA *Justice Collaborator* dan *Whistleblower*).

“Penataan Ulang Syarat *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika” menarik untuk dikaji karena didasarkan pada tiga hal. Pertama, Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Selain Saksi dan

---

<sup>1</sup> Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator, <http://www.hukumonline.com>, di akses pada tanggal 8 Februari 2018

Korban, ada pihak lain yang memberikan kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*), Pelapor (*Whistle-Blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak Ia dengar sendiri, tidak dia lihat sendiri, dan tidak Ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan.<sup>2</sup>

*Kedua*, ditinjau dari segi yuridis, ketentuan mengenai Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menegaskan bahwa “*Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik*”.

Jika dicermati, rumusan pasal tersebut tidak ditemukan prasyarat untuk menetapkan seorang saksi sebagai status *Justice Collaborator* dalam bentuk Undang-Undang, namun hanya diatur di dalam peraturan di bawah perundang-undangan. Seiring berjalannya waktu dan dalam pelaksanaannya, Undang-Undang tersebut ditemukan adanya kekurangan-kekurangan dalam mengatur

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

perlindungan terhadap saksi. Khusus pengaturan tentang peran *Justice Collaborator* dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan yang dapat dilihat dari: a) ruang lingkup “Pelaku yang Bekerjasama” yang masih terbatas; (b) peran “Pelaku yang Bekerjasama” harus dalam pengadilan; (c) persyaratan yang kurang jelas; (d) pemberian *reward* yang terbatas; (e) tidak ada kepastian terhadap pemberian *reward*; (f) pemberian perlindungan yang tidak pasti; (g) tidak ada standar mengenai menghitung kontribusi sebagai “Pelaku yang Bekerjasama”<sup>3</sup>

Lahirnya peran *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana narkoba bisa jadi merupakan suatu terobosan hukum baru yang merupakan hasil dari ratifikasi konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes*) Tahun 2002, namun di sisi lain masih menimbulkan pro dan kontra dalam memaknai penetapan status *Justice Collaborator*, dalam hal tersebut salah satu pendapat muncul dari Direktur *Institute for Criminal Justice Reform* (IJCR) Supriyadi W. Eddyono di Jakarta, yang menyatakan bahwa penetapan *Justice Collaborator* terhadap tersangka dan terdakwa yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar tindak pidana di pengadilan belum memiliki kesamaan pandangan. Padahal sejak Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, selama sepuluh

---

<sup>3</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Prospek Pengguna Pelaku Yang Bekerja Sama, dalam Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistleblower dan Justice Collaborator dalam sistem Peradilan Pidana*, dalam jurnal hukum Ius Quia Iustum Nomor 2 Volume 22 April 2015.

tahun penerapannya masih ditemukan permasalahan krusial dalam prasyarat penetapan status terhadap *Justice Collabulator*. Perbedaan cara pandang Hakim, Jaksa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atas pelaku yang bekerjasama mengakibatkan perlindungan terhadap pelaku yang bekerjasama sulit didapatkan.<sup>4</sup>

Ketentuan mengenai status sebagai *Justice Collabulator* untuk tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 34 A Ayat (1) huruf (a) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “*Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan : a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya*”, dalam regulasi tersebut masih terdapat kualifikasi yang mempersulit seorang yang melakukan tindak pidana narkoba untuk mengajukan diri sebagai *justice collaborator* terutama

---

<sup>4</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Ini Dampak Perbedaan Pandangan Penetapan Justice Collaborator di Pengadilan*, <http://www.hukumonline.com/>, di akses pada tanggal 7 Februari 2018

narapidana yang hanya sebagai pengguna narkoba. Dalam perkembangan selanjutnya, regulasi ini sedang direvisi dan terdapat beberapa hal yang diubah salah satunya penghapusan syarat *Justice Collaborator*, hal ini disebabkan karena adanya kebingungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan remisi terhadap narapidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme dan narkoba.<sup>5</sup>

Dampak yang terjadi atas tidak diaturnya prasyarat penetapan status *Justice Collaborator* dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1321 K/PID.SUS/2016, di mana dalam putusan tersebut terjadi disparitas penetapan status *Justice Collaborator* antara Jaksa Penuntut Umum dengan Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tinggi yang mengakibatkan kepastian hukum dan keadilan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama tersebut tidak dapat diberikan.

*Ketiga*, ditinjau dari segi implementasi, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana para penegak hukum dan masyarakat dapat berkontribusi dalam pengungkapan sindikat narkoba yang terjadi di Indonesia. Beberapa media masa memberitakan tentang peran *Justice Collaborator* yang sangat penting dalam hal tersebut. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengakui salah satu cara membongkar tindak pidana narkoba adalah dengan

---

<sup>5</sup> Dimas Jarot Bayu, *Ini Alasan Dihilangkannya Syarat "Justice Collaborator" dalam Revisi PP Remisi*, <http://nasional.kompas.com>, di akses pada tanggal 7 Februari 2018

memanfaatkan mekanisme *Justice Collaborator*.<sup>6</sup> Hal tersebut dikarenakan *Justice Collaborator* memiliki akses ke dalam jaringan narkoba. LPSK sebagai lembaga yang ditugaskan untuk melindungi saksi dan korban memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan kewajibannya dan hal ini masih perlu dikaji ulang terkait penetapan seorang pelaku kejahatan narkoba yang bersedia menjadi *Justice Collaborator* yang masih belum maksimal mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun dari ancaman lainnya.

Pemahaman yang baik tentang kejahatan termasuk perkembangannya dalam masyarakat tidak mungkin didapat tanpa mengetahui pula sistem yang dibangun untuk mengurangi kejahatan tersebut (dalam hal ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) serta cara melindungi masyarakat menjadi korban<sup>7</sup>, maka dari pernyataan tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dalam memahami kejahatan narkoba, mulai dari modus operandi beserta penyebarannya dan siapa saja yang menjadi pelaku serta korban, diperlukan suatu produk hukum yang kokoh dan ideal untuk memberikan suatu solusi terhadap bagaimana kejahatan tersebut bisa ditekan. Pada dasarnya, penyalahgunaan narkoba tidak hanya melibatkan peran pelaku utama, tapi juga orang-orang yang terjerumus sebagai pemakai. Abdul Haris Semendawai, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berpendapat bahwa dengan

---

<sup>6</sup> Teguh Nirwahyudi, *Justice Collaborator Kasus Narkoba Perlu Perlindungan Istimewa*, <http://news.metrotvnews.com/>, di akses pada tanggal 6 Februari 2018.

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro, 2012, *Jurna, Sindikat Narkoba dan Antisipasinya*, Volume II, Nomor I, hlm 14.

memberikan perlakuan istimewa seperti pemisahan berkas hingga keringanan hukuman menjadi pilihan yang dapat membantu para aparat penegak hukum membongkar suatu kasus, khususnya kejahatan narkoba, menjadi pilihan yang menguntungkan bagi seorang *Justice Collaborator* daripada menutup rapat informasi yang dimilikinya.<sup>8</sup> Sedangkan, ada pendapat lain oleh I Nyoman Serikat Putra Jaya yang menyatakan bahwa pemberian keringanan hukuman bagi para terpidana narkoba seharusnya diperketat karena bagi para pengguna yang divonis 6 (enam) tahun penjara tidak bisa menjamin akan memberikan kesaksian yang membantu para penyidik karena mereka hanya mengetahui penjual saja, tidak pada pelaku utamanya.<sup>9</sup> Maka dari itu perlu adanya suatu kesepakatan yang final di antara para ahli terhadap proses prasyarat penetapan *Justice Collaborator* beserta perlindungannya bagi para terpidana narkoba tersebut, khususnya para pengguna.

Berdasarkan ketiga hal di atas bahwasanya eksistensi dan peran *Justice Collaborator* sangat penting untuk mengungkap suatu tindak pidana narkoba mengingat hal tersebut merupakan salah satu kejahatan luar biasa, sehingga peran negara sangat di butuhkan secara masif untuk menata kembali peraturan yang di rasa belum cukup untuk melindungi serta memaksimalkan ketentuan penetapan *justice collaborator*.

---

<sup>8</sup> Abdul Haris Semendawai, *LPSK Sebut Perlunya Perlakuan Istimewa terhadap Justice Collaborator Kasus Narkoba*, <http://www.netralnews.com>, diakses pada tang 8 Februari 2018

<sup>9</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, di akses pada tanggal 8 Februari 2018



Payung hukum yang mengatur hal- hal apa saja yang dilindungi terkait *Justice Collaborator* sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun tidak ada regulasi yang mencantumkan mengenai prasyarat penetapan status *Justice Collaborator* secara gamblang atau tegas sehingga perlu ditata ulang agar kepastian hukum dan keadilan *Justice Collaborator* terjamin, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai tugas akhir penulisan hukum dengan judul **“Penataan Ulang Syarat *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah pada sasaran yang diharapkan, maka berdasarkan uraian dari di atas rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problem Pengaturan hukum dalam penetapan status *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana formulasi hukum yang ideal dalam penetapan status *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji :

1. Problem hukum dalam penetapan status *Justice Collaborator* tindak

pidana narkoba.

2. Formulasi hukum yang ideal dalam penetapan status *Justice Collabollator* tindak pidana narkoba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis dari penelitian tugas akhir ini, yaitu :

1. Penelitian hukum ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengayaan teori untuk memaksimalkan penetapan status *Justice Collabollator* tindak pidana narkoba.
2. Sebagai khazanah hukum yang bersifat inovatif bagi praktisi hukum dalam usaha meminimalisir tindak pidana narkoba melalui desain formulasi hukum yang ideal dalam penetapan status *Justice Collabollator* tindak pidana narkoba.

Adapun manfaat penelitian hukum ini secara praktis adalah :

1. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk memaksimalkan dalam penetapan status *Justice Collabollator* tindak pidana narkoba.
2. Penelitian hukum ini diharapkan menjadi pedoman dalam memperbaiki suatu regulasi yang sudah ada menjadi lebih efektif dalam penetapan status *Justice Collabollator* tindak pidana narkoba.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadikan pijakan baru dibidang ilmu hukum dalam rangka menambah wawasan terkait yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang ilmu hukum.

### **2. Bagi Mahasiswa**

Memberikan sumbangsih terhadap khazanah akademik hukum, khususnya bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan metode pemutakhiran hukum agar bersifat progresif.

### **3. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Melalui penulisan hukum ini diharapkan penegak hukum khususnya penyidik agar dapat menjalankan ketentuan hukum acara beserta undang-undang maupun formulasi yang di tawarkan dalam penulisan ini kedepan dapat memenuhi kepastian hukum terkait "*justice collaborator*".

### **4. Bagi Masyarakat**

Hasil penulisan hukum ini diharapkan mampu di serap oleh masyarakat dalam rangka untuk membantu aparat penegak hukum dalam menemukan pangkal dari pada peredaran narkoba secara ilegal melalui formulasi penetapan prasyarat *justice collaborator*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>10</sup>

#### **b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>11</sup>

### **2. Jenis Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penulisan Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana, hlm. 93.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 94.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku, jurnal hukum, dan karya tulis hukum yang dimuat diberbagai media yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Rancangan undang-undang, pendapat ahli, dan yang lainnya juga digunakan selama berhubungan dengan topic penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus hukum dan ensiklopedia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi kepustakaan (*library research*) dan studi internet, yang dimaksud adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penulisan hukum normatif.<sup>12</sup>

### **4. Teknik Analisa Data**

Adapun teknik analisa data dalam penulisan ini, di lakukan secara deskriptif kualitatif yakni pemilihan teori-teori, azas-azas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam hierarki perundang-undangan Indonesia. Kegiatan yang di lakukan dalam analisis data penulisan hukum normative

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, 2010, *Teori & Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang, Penerbit Bayu Media, hlm. 302.

dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu penulisan yang tidak menggunakan perhitungan.<sup>13</sup>

#### G. Rencana Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Waktu Kegiatan					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Pengajuan Out Line	X					
2.	Pengajuan Proposal	X					
3.	Seminar Proposal		X				
4.	Revisi proposal		X				
5.	Proses Ijin Penulisan		X				
6.	Penulisan			X			
7.	Proses Pembimbingan	X	X	X	X	X	X
8.	Penulisan Laporan				X		
9.	Ujian					X	

<sup>13</sup> Soejono dan H.Abdurrahman.2005.*Metode Penulisan.Suatu Pemikiran dan Penerapan.Jakarta.Penerbit Rineka Cipta.* hlm 26.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang dengan tujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan, kerangka teori, dan metode penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II berisi tentang teori-teori, pendapat ahli, dan kajian pustaka lain yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis untuk mendukung penulisan.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab III berisi tentang hasil penulisan yang dilakukan penulis yang dikaji secara sistematis berdasarkan tinjauan pustaka pada bab II.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab IV berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab III, serta saran dan rekomendasi dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.





